



PENGARUH PRINSIP VALUE FOR MONEY TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SALAMDARMA KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU

Deddy Suhardi¹

Administrasi Keuangan
Fakultas Ilmu Administrasi
deddysuhardi@unsub.ac.id

Aziz Muhammad²

Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
azizmuhammad@unsub.ac.id

Abstrak

Anggaran sektor publik penting karena anggaran merupakan alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan social ekonomi, menjalin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya, dan anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat. Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan agar setiap aktivitas dapat terarah dan terkontrol dengan baik. Anggaran sektor publik menjadi kendali dan tolak ukur untuk setiap aktivitas yang dilakukan.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, tetapi peneliti menggunakan metode survei, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi penelitian adalah sebanyak 62 orang. Dari jumlah tersebut, besar sampel yang akan dijadikan responden sebanyak 55 orang.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara umum pengaruh Value for Money terhadap Akuntabilitas Publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma dinilai tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil skor indeks rata-rata tertimbang yang diperoleh oleh variabel laten value for money yaitu 4,34 sedangkan untuk variabel laten akuntabilitas publik mencapai 3,62.

Temuan analisis deskriptif Value for Money terhadap Akuntabilitas Publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma ini memberikan implikasi bahwa Value for Money perlu untuk dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada masa-masa mendatang. Bagaimanapun, tingginya penerapan Value for Money yang ditunjukkan oleh Desa Salamdarma akan meningkatkan Akuntabilitas Publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kata kunci: *Value for Money*, Akuntabilitas Publik, APBDes



Abstract

The public sector budget is important because the budget is a government tool to direct socio-economic development, establish sustainability and improve people's quality of life. The budget is needed because of the problem of limited resources, and the budget is needed to ensure that the government is accountable to the people. The government uses the budget as a tool to design work programs or steps that will be taken so that each activity can be well directed and controlled. The public sector budget becomes the control and benchmark for every activity carried out.

This research method uses quantitative research methods. The sampling technique is generally done randomly, but researchers use survey methods, data collection uses research instruments, data analysis is quantitative or statistical in nature with the aim of testing predetermined hypotheses. The research population was 62 people. From this amount, the sample size that will be used as respondents is 55 people.

The results of the descriptive analysis show that in general the influence of Value for Money on Public Accountability in the Village Revenue and Expenditure Budget in Salamdarma Village is considered high. This can be seen from the results of the weighted average index score obtained by the latent variable value for money which is 4.34 while for the latent variable of public accountability it reaches 3.62.

The findings of this descriptive analysis of Value for Money on Public Accountability in the Village Revenue and Expenditure Budget in Salamdarma Village have implications that Value for Money needs to be maintained, even increased in the future. However, the high application of Value for Money shown by Salamdarma Village will increase Public Accountability in the Village Revenue and Expenditure Budget.

Keywords: *Value for Money, Public Accountability, APBDes*

Pendahuluan

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah pusat dan daerah diharuskan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan desa dalam satu tahun ke depan yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan desa. Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, lebih baik terhadap kondisi di tahun sebelumnya.

Anggaran sektor publik penting karena anggaran merupakan alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan social ekonomi, menjalin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya, dan anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat. Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan agar setiap aktivitas dapat terarah dan terkontrol dengan baik. Anggaran sektor publik menjadi kendali dan tolak ukur untuk setiap aktivitas yang dilakukan.

Jika mengacu pada World Bank dan UNDP (United Nation Development Program), orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance.



Beberapa karakteristik pelaksanaan good governance, meliputi: participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, dan strategic vision. Dari delapan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik dalam mengelola anggarannya yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan value for money.

Rakhmat (2018:154) mengemukakan bahwa keuangan dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, tanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Dalam reformasi sektor publik, reformasi anggaran meliputi perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan APBD. Perubahan struktur anggaran tersebut dimaksudkan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik. Hal tersebut juga memudahkan bagi publik untuk melakukan analisis, evaluasi, dan pengawasan atas pelaksanaan dan pengelolaan APBD.

Berbagai perubahan tersebut harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi: Akuntabilitas; Value for Money; Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity); Transparansi; dan Pengendalian. Menurut Mardiasmo (2004:29) indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (social welfare) yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sektor publik dikelola dengan memperhatikan konsep value for money.

Dalam konteks otonomi daerah, value for money merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governane. Value for money tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (public money) yang mendasarkan konsep value for money, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik.

Selain itu dalam mengelola anggaran diperlukan juga pemenuhan akuntabilitas. Pemenuhan akuntabilitas publik ditunjukkan melalui keterbukaan pemerintah dan publikasi anggaran, serta pemenuhan prinsip disiplin anggaran artinya anggaran disusun secara efektif dan efisien. Mardiasmo (2004:29) berpendapat, akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk itu, perumusan kebijakan bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertical maupun horizontal dengan baik. Pada dasarnya, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be informed), hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and listened to).

Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak melakukan vertical reporting, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan (termasuk pemerintah pusat), akan tetapi juga melakukan horizontal reporting, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai bentuk horizontal accountability. Salah satu tujuan reformasi pengelolaan keuangan



daerah adalah mengubah pola pertanggungjawaban vertical menjadi pola pertanggungjawaban horizontal.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak terjadi kasus penyalahgunaan APBDes oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas APBDes. Hal ini dapat terjadi karena tidak terpenuhinya prinsip value for money dan kurangnya akuntabilitas publik, sehingga pihak-pihak terkait memiliki celah untuk melakukan kecurangan.

Desa Salamdarma memiliki 5 dusun yang berbatasan dengan Desa Bugis Tua di sebelah barat, Desa Bugis di sebelah utara, Desa Kedungwungu di sebelah selatan, dan Desa Lempuyang di sebelah timur. Mayoritas masyarakat di Desa Salamdarma sebanyak 85% berpenghasilan dari penggarapan pertanian. Dari sisi tingkat pendidikan, rata-rata penduduk di Desa Salamdarma merupakan lulusan SMA atau sederajat. Hal ini menyebabkan adanya keberagaman partisipan yang terlibat dalam penyusunan ataupun pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan pada Desa Salamdarma Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, diketahui data sebagai berikut:

TABEL 1
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SALAMDARMA TAHUN 2019

No.	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Pajak dan Retribusi Desa	67.456.359	33.232.000	37.208.000
2	Alokasi Dana Desa	552.838.000	524.687.000	-
3	Penerimaan dan Rencana Pendapatan Desa			
3.1	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa Salamdarma			
	1. Tanah Kas Desa/Bengkok Swadaya		508.260.000	508.260.000
	2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		86.725.000	86.725.000
3.2	Pos Bantuan Dana dari Provinsi		115.000.000	127.000.000
	1. Penyisihan Penerimaan PBB bagian Provinsi Jawa Barat		-	-
	2. Sumbangan dan bantuan lainnya (RT/RW)		524.687.000	561.796.000
3.3	Pos Bantuan dari Pemerintah Pusat		-	-
	1. Bantuan Pemerintah Desa ADD		1.811.919.000	1.260.628.000
	2. Tunjangan Kurang Penghasilan		2.406.904.000	2.539.645.000
	3. Dana Bantuan Dana Desa			
	Jumlah			
4	Belanja Desa			
4.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		828.661.200	796.560.200
4.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		1.268.253.800	1.376.836.600



4.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		77.576.000	109.785.000
4.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		128.153.000	252.138.200
4.5	Pembiayaan		100.000.000	-
	Pos biaya tak terduga			
	1. Bidang tak terduga		2.000.000	2.065.000
	2. Kegiatan kejadian luar biasa (Dana Kematian)		2.260.000	2.260.000
			2.406.904.000	2.539.645.000
	Jumlah			

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa Salamdarma 2019

Dari data tersebut ditemukan indikator masalah sebagai berikut:

1. Dalam rincian APBDDes Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, biaya yang dikeluarkan untuk belanja Alat Tulis Kantor (ATK) mencapai Rp. 20.618.200,- dari 8 kegiatan yang diselenggarakan Desa, hal ini disebabkan karena kurangnya pertanggungjawaban dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif tidak memenuhi akuntabilitas hukum dan kejujuran.
2. Biaya Kegiatan Pembangunan Gapura & Tanda Tapal Batas Desa senilai Rp. 105.000.000,- dengan desain dan model sederhana. Berupa tiang besi sebagai penyangga dan tulisan batas desa yang membentang, hal ini disebabkan karena kurangnya perhitungan biaya yang kurang efisien tidak memenuhi akuntabilitas proses.
3. Masing-masing Dusun di Desa Salamdarma dibangun posyandu yang sekarang tidak digunakan, hal ini disebabkan karena kurangnya pertanggungjawaban program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program tidak memenuhi akuntabilitas program.
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDes yang disebabkan karena kurangnya transparansi pemerintah Desa kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan identifikasi masalah, yaitu:

1. Seberapa besar prinsip *Value for Money* diterapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu?
2. Seberapa besar Akuntabilitas Publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu?

Kerangka Teori

A. Konsep *Value for Money*

Haryanto, dkk (2007:6), *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Mardiasmo (2009:130), elemen pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik, meliputi: ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu: ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) penggunaan sumber daya dalam artian penggunaan diminimalkan, serta efektivitas (berhasil guna) tercapainya tujuan dan sasaran.

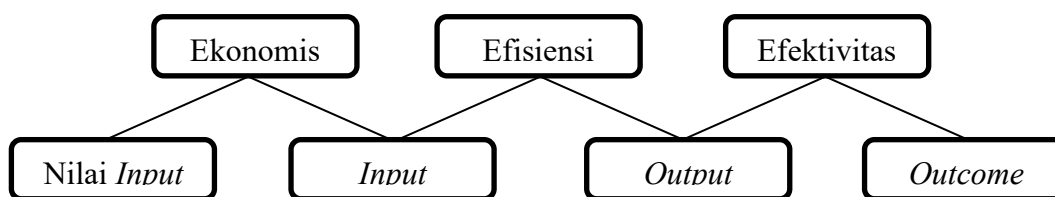


Konsep pokok *value for money* antara lain.

1. Ekonomi: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efisiensi: pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atas penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok *value for money*, namun beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup. Perlu ditambah dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (*social opportunity*) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata (*equality*). Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.

Secara sistematis *value for money* dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Mardiasmo (2009:5)

Gambar 2
KONSEP VALUE FOR MONEY

Mardiasmo (2009:5), adapun definisi *input*, *output* dan *outcome* adalah:

- 1) *Input* merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program dan aktivitas.
- 2) *Output* merupakan hasil atau nilai tambah yang dicapai oleh kebijakan, program dan aktivitas.
- 3) Sasaran Antara (*Throughput*) merupakan analisis *value for money* memerlukan data *input* dan *output* yang memadai karena *value for money* mempunyai kaitan erat dengan pengukuran *input* dan *output*.
- 4) *Outcome* merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu.

B. Manfaat Implementasi Konsep Value for Money

Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Implementasi konsep *value for money* diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik.

Halim, dalam Mahsun (2006:186), konsep *value for money* sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep



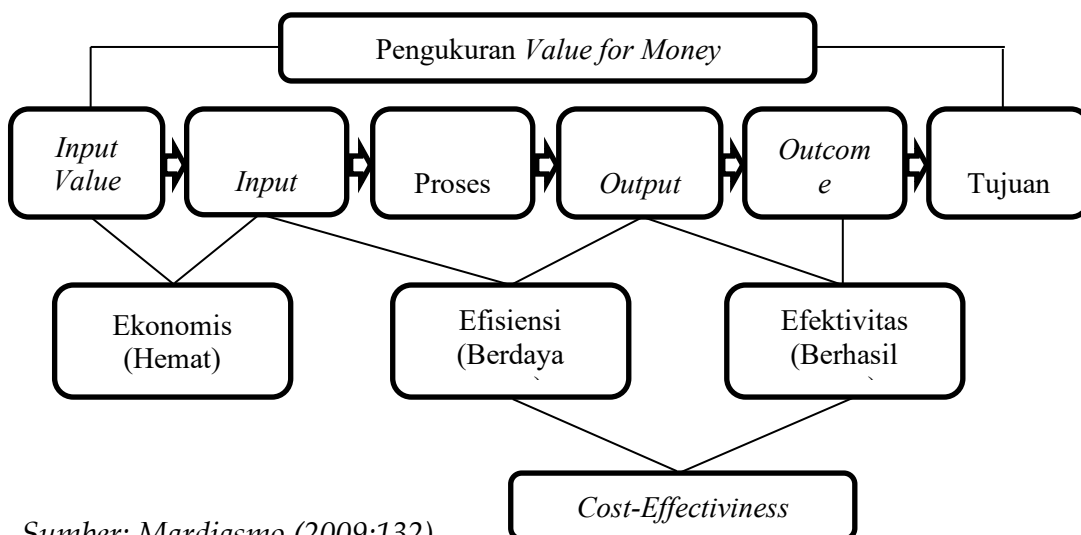
tersebut akan memberikan manfaat, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input;
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

C. Pengukuran *Value for Money*

Mardiasmo (2009:132), ketiga pokok dalam *value for money* sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Ekonomis mengenai masukan, efisiensi membahas mengenai masukan dan keluaran serta efektivitas membahas mengenai keluaran dan dampak. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3
PENGUKURAN *VALUE FOR MONEY*



Sumber: Mardiasmo (2009:132)

1) Ekonomis

Mahsun (2006:181), ekonomis adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*), dengan kata lain ekonomis merupakan praktik pembelian barang dan jasa pada tingkat kuantitas dan kualitas tertentu dengan harga yang terbaik.

Haryanto, dkk (2007:6), ekonomis adalah pemerolehan input dengan kuantitas dan kualitas tertentu pada harga terendah. Ekonomis merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter, serta ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Manfaat dari ekonomis, yaitu: dengan menghindari pengeluaran yang berlebihan pada organisasi yang dapat menimbulkan kegiatan yang tidak produktif pada organisasi, disamping itu juga organisasi dapat menilai sejauh mana organisasi dapat meminimalisir biaya yang digunakan. Secara umum ekonomis adalah untuk melakukan pengukuran terhadap tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik tersebut.



2) Efisiensi

Indra (2006:280), efisiensi merupakan hubungan antara input dan output dimana barang jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. Haryanto, dkk (2007:6), efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input yang terendah. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Manfaat yang ada dalam efisiensi, yaitu: dapat menetapkan standar kerja yang tepat bagi perusahaan dalam peningkatan kinerja yang lebih baik, disamping itu juga organisasi dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, dengan penggunaan biaya yang serendah-rendahnya dan menghasilkan tingkat keluaran yang optimal. Secara umum efisiensi adalah untuk melakukan pengukuran terhadap tingkat masukan (*input*) yang kemudian akan dibandingkan dengan tingkat keluaran (*output*) organisasi sektor publik tersebut.

3) Efektivitas

Indra (2006:280), efektivitas adalah hubungan output dengan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan sejauh mana tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Heryanto, dkk (2007:6), efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Efektivitas bermanfaat untuk mengetahui program atau kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dicapai oleh organisasi dan apa saja yang telah dilakukan oleh organisasi dalam target yang telah ditetapkan. Secara umum efektivitas adalah untuk melakukan pengukuran terhadap tingkat keluaran (*output*) dari organisasi sector publik dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan.

D. Akuntabilitas Publik

Secara terminologi, akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan apa dana publik itu ditetapkan. Oleh sebab itu, akuntabilitas diperlukan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan oleh birokrasi.

Menurut Nisjar (1977) akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kewajiban yang ditetapkan. Pandangan serupa dikemukakan oleh Tjokroamidjodjo (2000) dengan menyatakan akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau pejabat pemerintah yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya agar dapat menjawab berbagai hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Akuntabilitas menurut Krina (2003) merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Tjahjanulin (2002) berpandangan akuntabilitas adalah kewajiban bagi pengelola keuangan daerah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya.

Mahmudi (2007) mengatakan akuntabilitas berarti kebijakan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan fungsinya, akuntabilitas berfungsi menyajikan informasi mengenai keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil selama



beroperasinya suatu entitas (satuan usaha), memungkinkan pihak luar (misalnya legislative, auditor dan masyarakat luas) untuk me-review informasi tersebut dan mengambil tindakan korektif jika dibutuhkan.

Birokrasi publik dikatakan akuntabel manakala mereka dinilai secara objektif oleh masyarakat dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada pihak dimana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki itu berasal, hal ini dikemukakan oleh Widodo (2002). Berdasarkan pemahaman diatas, maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Prinsip akuntabilitas menetapkan bahwa sesungguhnya setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintah melalui birokrasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Djalil (2014), mengatakan bahwa ciri pemerintah yang akuntabel adalah:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat;
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat;
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada publik;
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan; serta
5. Sebagai sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sektor publik diperlukan adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat, khususnya pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan. Berikut indikator-indikator akuntabilitas publik menurut Intifidha (2014) yaitu:

1. Pengetahuan pemerintah desa tentang prosedur dan mekanisme penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBDes
2. Pengetahuan pemerintah desa tentang pembiayaan bidang dan sektor APBDes
3. Kemampuan pemerintah desa dalam menyampaikan hasil keputusan rapat paripurna terbuka dan kebijakan publik kepada masyarakat serta keterlibatan masyarakat didalamnya
4. Penilaian kinerja pemerintah desa dari masyarakat
5. Akuntabilitas Publik antara pemerintah desa dan masyarakat

E. Tingkatan Akuntabilitas

Triwuyono (2005) dalam Sunardi mengatakan tingkatan akuntabilitas dibagi menjadi 5 yaitu:

1. *Accountability For Probability and Legality*, menekankan bahwa kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang tidak melampaui batas.
2. *Process Accountability*, menekankan aktivitas dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. *Performance Accountability*, menekankan pada kinerja dari suatu entitas yang disampaikan kepada publik.
4. *Programme Accountability*, menekankan pada program dari suatu entitas yang disampaikan pada publik.
5. *Policy Accountability*, menekankan pada kebijakan dari suatu entitas yang disampaikan kepada publik.



F. Dimensi akuntabilitas

Haryanto, dkk (2007:13), akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sector publik terdiri atas empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sector publik, yaitu: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan.

Harun (2004:64), bentuk pertanggungjawaban publik oleh pemerintah daerah ada empat pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Pertanggungjawaban tersebut yaitu: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan organisasi sector publik terdiri dari beberapa dimensi. Hopwood & Tomkins (1984) dalam Rakhmat (2018:145) menjelaskan terdapat beberapa dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik, antara lain:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for public and legality*)
Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law exforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik oranisasi yang sehat, tidak terjadi malapraktik dan malaadministrasi.
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*)
Akuntabilitas proses terkait dengan yang digunakan dalam melaksanakan tugas, apakah sudah cukup baik dalam hal kecukupan akuntabilitas sistem informasi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, *responsive*, dan biaya murah.
3. Akuntabilitas program (*program accountability*)
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, serta apakah orgnisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggung jawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

G. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dalam Permendagri 113 tahun 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dijelaskan juga bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud adalah uang yang



menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimulai dari tersusunnya Rancangan Pembangunan Jangka Menengah dan Rancangan Program Kerja yang diselenggarakan pada bulan Juli sampai dengan bulan September. Bulan setelahnya yaitu bulan Oktober disusunlah Rancangan Peraturan Desa yang didalamnya termuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Setelah disusun adanya Rancangan Peraturan Desa tersebut, Rancangan Peraturan Desa tersebut diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan di sepakati bersama. Setelah disepakati bersama Rancangan Peraturan Desa tersebut di bahas dalam musyawarah masyarakat. Ketika proses tersebut telah dilalui, Rancangan Peraturan Desa diberikan kepada Bupati setempat untuk disetujui dan diketahui. Bupati mendelagasikan kepada camat untuk masalah ini. Jika tidak disetujui maka akan ada penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa atau akan ada penghapusan Peraturan Desa. Jika nantinya disetujui oleh camat maka akan ada pengesahan terhadap Peraturan Desa yang didalamnya terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. kepala desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya tentang APBDes kepada perangkat desa. Tujuan utama dari APBDes adalah pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasaran desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian wewenang dalam proses penyusunan desa kepada perangkat desa yaitu sekretaris desa dan bendahara desa.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:13) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme (filsafat positivisme memandang realitas atau gejala atau fenomena itu dapat diklasifikasikan, relative tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat), digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, tetapi peneliti menggunakan metode survei, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Populasi penelitian adalah sebanyak 62 orang. Dari jumlah tersebut, besar sampel yang akan dijadikan responden sebanyak 55 orang. Hal ini merujuk pada pendapat Siswoyo Haryono (2017:14) dan Iman Ghozali (2014:9), menyebutkan bahwa kekuatan analisis didasarkan pada porsi dari model yang memiliki jumlah prediktor terbesar. Minimal direkomendasikan berkisar dari 30-100 kasus.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. Pengelola Keuangan Desa | 10 orang |
| 2. Badan Pengawas Desa | 11 orang |



- 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa 15 orang
- 4. Masyarakat 19 orang
- 55 orang

Tabel 2
OPERASIONALISASI VARIABEL

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
<i>Value for Money</i> (Mardiasmo, 2004)	Ekonomi	- Pengalokasian sumber daya secara optimal	Ordinal	1
		- Pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah		2
		- Pengalokasian sumber daya sesuai kebutuhan		3
		- Pemerolehan input dengan kuantitas sesuai dengan tujuan		4
	Efisien	- Tingkat input anggaran - Tingkat output anggaran - Pendayagunaan output	Ordinal	5
				6
				7
	Efektif	- Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan - Kebijakan - Prosedur dalam menjalankan program	Ordinal	8
				9
				10
Akuntabilitas Publik (Hopwood & Tomkins, 1984)	Akuntabilitas hukum dan kejujuran	- Mempunyai kejelasan informasi - Transparansi kepada masyarakat - Berorientasi kepada hukum	Ordinal	1
				2
				3
	Akuntabilitas proses	- Proses dan Prosedur - Ketepatan waktu - Manfaat kebijakan	Ordinal	4
				5
				6
	Akuntabilitas program	- Efektifitas Program - Efisiensi Program	Ordinal	7
				8



	Akuntabilitas kebijakan	- Mempertanggung jawabkan kebijakan - Mengevaluasi kebijakan	Ordinal	9 10
--	-------------------------	---	---------	---------

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mempelajari dan menganalisis beberapa literatur atau bahan bacaan yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas, seperti : buku, majalah, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.
2. Studi Lapangan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada lokasi/objek penelitian teknik yang digunakan sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung ke objek penelitian untuk melihat dan mencatat kegiatan yang berhubungan dengan bahasan yang sedang diteliti.
 - b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab meminta keterangan secara langsung kepada pihak yang berkompeten yang ada relevansinya dengan bahasan yang sedang diteliti.
 - c. Angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) - *Partial Least Square* (PLS) model persamaan struktural atau *Structural Equation Modeling* (SEM) digunakan untuk menghitung pengaruh yang muncul dari hubungan antara variabel yang diolah berdasarkan dari hasil pengumpulan data responden.

Penelitian ini menggunakan data dari responden sebanyak 55 orang yang diolah menggunakan alat analisis model persamaan Struktural - Partial Least Square (SEM-PLS) dengan menggunakan software Smartpls 3.0 yang lebih bersifat predictive model.

Dalam penelitian ini, estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat dikategorikan menjadi tiga. Pertama, adalah weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kedua, mencerminkan estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (*loading*). Ketiga adalah berkaitan dengan *mean* dan lokasi parameter (nilai konstan regresi) untuk indikator dan variabel laten.

Hasil dan Pembahasan

Responden dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa Salamdarma, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta Masyarakat yang terlibat dalam APBDes. Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 55 kuesioner. Data karakteristik responden yang digambarkan pada penelitian ini terdiri dari Usia, Latar Belakang Pendidikan dan Pekerjaan.

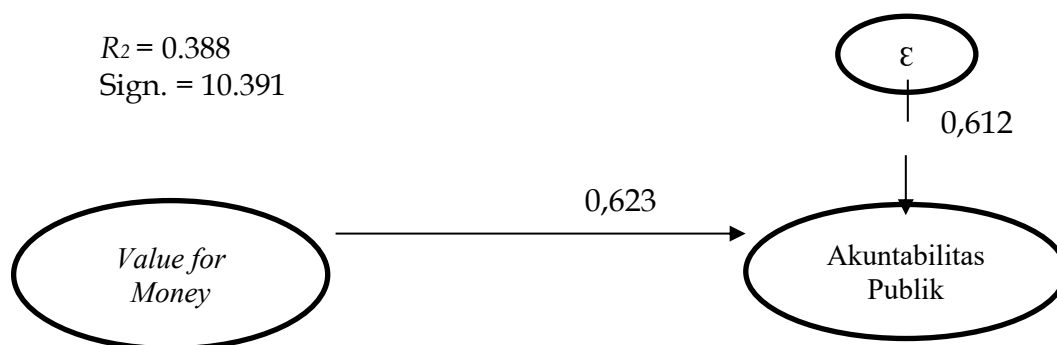
Karakteristik responden berdasarkan usia dari 55 orang responden yang menjadi objek penelitian, responden yang berusia 21-30 tahun sebanyak 2 orang (2%), berusia 31-40 tahun sebanyak 8 orang (14%), berusia 41-50 tahun sebanyak 27 orang (49%), dan sisanya lebih dari 50 tahun sebanyak 15 orang (35%). Keadaan ini merupakan gambaran umum pegawai Desa Salamdarma, BPD, LKD dan masyarakat yang menjadi responden penelitian.

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dari 55 responden sebagai objek penelitian, responden sebanyak 18 orang (33%) dengan tamat SD/MI, responden



sebanyak 23 orang (42%) dengan tamat SMP/MTS, responden sebanyak 12 orang (22%) dengan tamat SMA/SMK, serta responden sebanyak 2 orang (3%) dengan tamat S1. Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan dari 55 orang responden sebagai objek penelitian, petani sebanyak 24 orang (44%), wiraswasta sebanyak 11 orang (20%), pegawai desa sebanyak 16 orang (29%), serta pekerjaan lainnya sebanyak 4 orang (7%). Dengan hasil data penelitian tersebut mayoritas pekerjaan terbanyak adalah petani. Analisis rekapitulasi skor variabel *value for money* hasil jawaban responden menyatakan setuju (sangat setuju dan setuju) atas variabel *value for money* ini 51%, sementara yang menilai kurang positif dengan persepsi tidak setuju atas variabel ini mencapai 11%. Namun demikian, pada variabel ini ternyata persepsi yang tidak jelas dengan persepsi ragu-ragu dari responden merupakan proporsi yang besar juga mencapai 38%. Hasil rekapitulasi skor variabel *value for money* diatas dapat dijelaskan bahwa besarnya presentase yang menyatakan setuju menunjukkan bahwa anggaran sudah cukup memenuhi prinsip *value for money* dalam pengelolannya. Berdasarkan Indeks dengan penggunaan skala penghitungan 1 sampai dengan lima, maka angka indeks rata-rata sebesar 4,34 yang diraih oleh variabel *value for money* ini termasuk pada kategori sangat tinggi. Hasil pengukuran ini didasarkan pada posisi angka indeks yang berada pada rentang antara 4,19 sampai dengan 5,00. Analisis rekapitulasi skor variabel akuntabilitas publik, jumlah jawaban responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap variabel akuntabilitas publik menjadi angka mayoritas 59%, sementara yang menilai kurang positif dengan persepsi tidak setuju atas variabel ini mencapai 14%. Namun demikian, pada variabel ini ternyata yang menilai tidak jelas dengan persepsi ragu-ragu dari responden merupakan proporsi yang besar juga mencapai 27%. Hasil skor keseluruhan variabel akuntabilitas publik dapat dijelaskan bahwa besarnya presentase akuntabilitas publik menyatakan setuju, karena para pengelola anggaran telah memberikan akuntabilitas publik yang baik. Berdasarkan indeks dengan penggunaan skala penghitungan 1 sampai dengan lima, maka angka indeks rata-rata sebesar 3,62 yang diraih oleh variabel akuntabilitas publik ini termasuk pada kategori tinggi. Hasil pengukuran ini didasarkan pada posisi angka indeks yang berada pada rentang antara 3,39 sampai dengan 4,19 Berikut adalah hasil analisis model struktural *Value for Money* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma:

Gambar 4
Diagram Path Model Struktural



Terlihat dari gambar di atas bahwa perhitungan dengan menggunakan software SmartPLS menghasilkan koefisien jalur atau *factor loading* dari variabel Laten *Value for Money* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma sebesar



0.623 dengan nilai t-hitung sebesar 10.391. Nilai t-hitung ini lebih besar dari 1.96 sebagai *rule of thumbs* untuk menentukan signifikansi, sehingga hasil evaluasi model struktural ini dinyatakan signifikan.

Dengan mengkuadratkan koefisien jalur ini diperoleh koefisien determinasi dengan nilai sebesar 0.388. Nilai ini menjelaskan bahwa sebesar 38,8% termasuk dalam model struktural mengidikasi kategori “rendah” keragaman dari variabel akuntabilitas publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma dapat dijelaskan oleh variabel *value for money*. Sementara itu sisanya yang dikenal dengan sebutan varians error sebesar 0.612 menjelaskan bahwa sebesar 61,2% keragaman dari akuntabilitas publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terdapat pengaruh *Value for Money* terhadap Akuntabilitas Publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma sebesar 10,391, lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel (1.96) sehingga dapat diputuskan bahwa hipotesis satu diterima dan hipotesis nol ditolak atau dengan kata lain terdapat pengaruh *Value for Money* terhadap Akuntabilitas Publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma.

Value for Money dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma ini dipandang sebagian besar responden memberikan kontribusi terhadap Akuntabilitas Publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma secara signifikan, dengan besar pengaruh mencapai 0.388 atau 38,8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh *Value for Money*, dapat merefleksikan atau menggambarkan Akuntabilitas Publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma.

Jadi dapat dinyatakan adanya pengaruh dari *Value for Money* terhadap Akuntabilitas Publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma, dan pengaruh tersebut signifikan. Artinya perubahan pada *Value for Money*, akan memberikan dampak terhadap Akuntabilitas Publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma.

Pembahasan

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara umum pengaruh *Value for Money* terhadap Akuntabilitas Publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma dinilai tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil skor indeks rata-rata tertimbang yang diperoleh oleh variabel laten *value for money* yaitu 4,34 sedangkan untuk variabel laten akuntabilitas publik mencapai 3,62.

Temuan analisis deskriptif *Value for Money* terhadap Akuntabilitas Publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma ini memberikan implikasi bahwa *Value for Money* perlu untuk dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada masa-masa mendatang. Bagaimanapun, tingginya penerapan *Value for Money* yang ditunjukkan oleh Desa Salamdarma akan meningkatkan Akuntabilitas Publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Mardiasmo (2004:29), indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sektor publik dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*.



Dalam pengelolaan anggaran, tanpa efisiensi dan efektivitas akan menimbulkan kebocoran dana yang kemungkinan membuat pembangunan desa tidak optimal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka *value for money* seharusnya bisa menangani permasalahan kebocoran dana, untuk mengatur anggaran dan membantu pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengoptimalan pembangunan, mencegah penyimpangan, sekaligus menjadi suatu pertanggungjawaban yang baik.

Pada dasarnya menurut mardiasmo (2002) yang melihat sektor publik dari sudut pandang ekonomi adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Artinya pemerintah desa Salamdarma menjadi wadah untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan pemasukan anggaran dan belanja anggaran.

Secara umum variabel *value for money* terhadap akuntabilitas publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma baik. Hal ini dicirikan pemerintah desa membelanjakan anggaran desa memenuhi kebutuhan ekonomis, efektif, efisien. Dengan pemenuhan prinsip *value for money* yang baik akan memberikan dampak yang baik terhadap akuntabilitas publik guna tercapainya *good governance*. *Value for money* ini terbentuk karena pemerintah desa Salamdarma memperoleh masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah, mendapatkan masukan tertentu dengan keluaran maksimum, dan membuat keluaran mempunyai nilai dayaguna sehingga anggaran yang dikelola sesuai dengan yang diharapkan pemerintah desa maupun masyarakat yang merasakan manfaatnya.

Pada variabel akuntabilitas publik, data deskriptif variabel ini menunjukkan score indeks rata-rata tertimbang sebesar 3,62 yang kemudian dapat dikelompokkan pada kategori baik. Hal yang sama juga terlihat pada hasil pengukuran melalui Analisis Faktor Konfirmatori yang menunjukkan semua indikator merefleksikan variabel ini secara valid dan reliabel. Angka akuntabilitas publik yang menunjukkan angka tinggi tersebut menandakan bahwa pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah memenuhi dan mampu dipertanggungjawabkan dengan baik.

Dari uraian diatas terlihat bahwa *value for money* memiliki relevansi yang kuat dengan peningkatan akuntabilitas publik yang baik secara konseptual, maupun secara empirik. Hal ini dikarenakan akuntabilitas publik dapat dijadikan acuan dan tolak ukur dalam pencapaian kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa di Desa Salamdarma. Dengan demikian pemenuhan prinsip *value for money* akan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh prinsip *value for money* terhadap akuntabilitas publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma, dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat penerapan prinsip *value for money* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma dinilai sangat baik.
2. Tingkat akuntabilitas publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma dinilai baik.
3. Berdasarkan hasil analisis terdapat pengaruh prinsip *value for money* terhadap akuntabilitas publik, dengan menggunakan software SmartPLS menghasilkan koefisien jalur atau *factor loading* dari variabel Laten *Value for Money* dalam



Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Salamdarma sebesar 0.623 dengan nilai t-hitung sebesar 10.391 (nilai t-hitung ini lebih besar dari 1.96) sebagai *rule of thumbs* untuk menentukan signifikansi, sehingga hasil evaluasi model struktural ini dinyatakan signifikan.

4. Dengan mengkuadratkan koefisien jalur, diperoleh koefisien determinasi dengan nilai sebesar 0.388. Nilai ini menjelaskan bahwa variabel akuntabilitas publik dapat dipengaruhi oleh prinsip *value for money* sebesar 38,8%, sementara itu sisanya (*varians error*) sebesar 0.612 atau 61,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Referensi

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. PT. Gramedia Erlangga: Semarang
- Fauzia, Anita. 2018. "Pengaruh Kompetensi Pengurus terhadap Kinerja Koperasi Kopkarlitan BB Padi Sukamandi"
- Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modeling*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Haryanto, Sahmudin, dan Arifuddin. 2017. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Universitas Diponegoro: Semarang
- Haryono, Siswoyo. 2017. *Metode SEM: Untuk Penelitian Manajemen Amos, Lisrel, PLS*. Luxima Metro Media: Jakarta Timur
- Mahsun. 2006. *Pengukuran Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. BPFE: Yogyakarta
- Mahsun, Firma, dan Heribertus. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. BPFE: Yogyakarta
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Keempat*. ANDI: Yogyakarta
- RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Meri, Afsita dan Khairani, Siti. 2012. "Analisis *Value for Money* dan Akuntabilitas dalam Meningkatkan Pelayanan Publik pada PDAM Tirta Musi Palembang".
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Rakhmat. 2018. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. ANDI: Yogyakarta.
- Saputra, Julius. 2015. "Pengaruh *Value for Money* (Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas) terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang)."
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. ALFABETA: Bandung.
- Tiwinarni. 2017. "Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali".
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta